

Dr. Tjipto Subadi, M.Si

INOVASI PENDIDIKAN



INOVASI PENDIDIKAN

PENULIS



Dr. H. Tjipto Subadi, M.Si., adalah dosen FKIP dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Dilahirkan di Sukoharjo, 7 Juni 1953. Alumnus MI Muhammadiyah Gatak Klaseman 1966, SMP YAPI Tegalondo, PGAP Negeri Klaten 1971, PGAA Negeri Surakarta tahun 1972 dan Sarjana FKIP UNS 1979, S2 Sosiologi Pedesaan UMM Malang lulus tahun 1996. Gelar Doktor Ilmu Sosial UNAIR Surabaya diraih pada tahun 2004. Selain mengajar penulis aktif dalam kegiatan riset, penulisan jurnal ilmiah, penelitian, dan seminar. Karya ilmiah yang dipublikasikan diantaranya, yang berupa buku: *Micro Teaching* (FKIP UMS, 1984), *Alat Peraga Pendidikan* (FKIP UMS, 1985), *Pengantar Teknologi Pendidikan* (FKIP UMS, 1988), *Kewarganegaraan dan IPS Paket A Setara SD* (Widyaduta, 2007), *Psikologi Umum* (Zie Informatika, 2008), *Sosiologi dan Sosiologi Pendidikan* (Fairus Media Duta Pertama Ikmu, 2009), *Sosiologi* (FKIP UMS, 2010), *Kewarganegaraan / Civic Education* (FKIP UMS, 2010), *Lesson Study Berbasis PTK* (FKIP UMS, 2011), *Modul Sosiologi Untuk SMA* (FKIP UMS, 2011). Karya penulis dalam jurnal ilmiah yang dimuat 5 tahun terakhir diantaranya: *Pendidikan dalam perspektif perubahan sosial* (Varidika, FKIP UMS), *Manajemen Pendidikan dasar sebagai determinan mutu pendidikan di Indonesia* (Varidika), *Boro; Mobilitas Penduduk Suatu Pendekatan kualitatif* (Akademika), *Peningkatan kualitas Micro teaching dan PPL melalui Lesson Study Calon Matematika FKIP UMS* (Jurnal Pengelolaan Pendidikan), *Sending the Indonesian workers to Malaysia: a case study the female workers from Central Java with a fenomenology approach* (Journal of Labour Review, Malaysia), *An impac of economic globalization on the Indonesian industrialization Performance* (Prosiding Conference on economics, Management and Accounting (Malaysia-Indonesia, 2010). Penelitian yang dilakukan diantaranya pada Hibah Dikti PHK Matematika, Hibah Pasca Dikti/DP2M, Hibah Dikti PHK PGSD, International Batch II DP2M Dikti. Penulis juga aktif menulis di mass media (Suara Karya, Suara Merdeka, Pelita, Wawasan, dan Joglo Semar).



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Inovasi Pendidikan

ISBN: 978-979-636-126-7

viii, 151 p., 21 cm

Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012
I. Tjipto Subadi
II. Pendidikan

Cet.1: 2012
Tata Letak: Aksan
Design Cover: Irsan

Copyright ©2012

Diterbitkan Muhammadiyah University Press
Universitas Muhammadiyah Surakarta

MUHAMMADIYAH UNIVERSITY PRESS

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kampus 1, Gedung I: Jl. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan Surakarta 57102
Telp. 0271-717417 psw. 172; Fax. 0271-715448;

Email: mupress@yahoo.com

Semua hak dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memproduksi, dan menyebarkan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya, buku Inovasi Pendidikan ini dapat selesai. Derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi maka setiap pengajar dituntut agar produktif dalam berkarya dibidang penulisan buku ajar.

Buku ajar ini disusun dari hasil penelitian tentang *lesson study* dan didukung dari berbagai sumber buku dan akses internet. Buku ini menjelaskan Kebijakan inovasi pendidikan yang meliputi inovasi pembelajaran berbasis *lesson study* dan Penelitian Tindakan Kelas, dilengkapi beberapa kajian tentang rofesionalisme guru dan model pembelajaran.

Buku ini dapat terbit atas bantuan akademik dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan pemikiran, dorongan dan harapan sekaligus do'a dan restu sehingga buku ini dapat selesai. Harapan dan doa penulis semoga menjadi amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat, amin.

Penulisan buku ini pasti ada kekurangan, oleh karena itu kepada semua pihak diharapkan memberikan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan buku ini pada masa-masa yang akan datang. Semoga buku ini bermanfaat, amin ya robbal 'alamien.

Surakarta, Mei 2012
Penyusun,

Tjipto Subadi



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENERBIT | ii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR SINGKATAN | viii |
| BAB I INOVASI PENDIDIKAN | 1 |
| A. Pengertian Inovasi Pendidikan | 1 |
| B. Kebijakan dalam Inovasi Pendidikan | 12 |
| C. Inovasi di Bidang Pembelajaran | 13 |
| BAB II INOVASI DI BIDANG PEMBELAJARAN | 17 |
| A. Model Pembelajaran Inovatif | 17 |
| B. Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif | 24 |
| BAB III LS SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN | 29 |
| A. Pengertian <i>Lesson Study</i> | 29 |
| B. Konsep Dasar Tahapan-Tahapan <i>Lesson Study</i> | 34 |
| C. Modifikasi Tahapan <i>Lesson Study</i> | 37 |
| D. Sejarah dan Perkembangan <i>Lesson Study</i> | 45 |
| E. Alasan Yuridis Pelaksanaan LS | 55 |
| F. Tujuan, Manfaat, Dampak LS | 55 |
| G. LS dalam Pengembangan Profesionalisme Guru | 57 |
| H. Implementasi <i>lesson study</i> dalam pembelajaran | 61 |
| BAB IV ROAD MAP PENELITIAN <i>LESSON STUDY</i> | 67 |
| BAB V PTK SEBAGAI INOVASI PEMBELAJARAN | 83 |
| A. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas (PTK) | 83 |
| B. Karakteristik, Prinsip, Tujuan dan Manfaat PTK | 88 |
| C. Rancangan Penelitian Tindakan Kelas | 92 |
| D. Format Usulan PTK | 97 |

| | |
|--|------------|
| BAB VI PROFESIONALISME GURU | 102 |
| A. Aliran Filsafat Pendidikan | 102 |
| B. Profesi Guru | 102 |

| | |
|---|------------|
| BAB VII MODEL PEMBELAJARAN | 102 |
| A. Pendekatan Model Pembelajaran | 102 |
| B. Strategi Pembelajaran | 102 |
| C. Metode Pembelajaran | 102 |

| | |
|---|------------|
| BAB VIII <i>LESSON STUDY</i> BERBASIS | 102 |
| A. <i>Lesson Study</i> berbasis PTK | 102 |
| B. Macam-Macam <i>Lesson Study</i> Berbasis PTK | 102 |
| C. Model <i>Lesson Study</i> Berbasis PTK | 102 |
| D. LS Berbasis PTK Untuk Meningkatkan | 102 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |
| INDEKS | 102 |
| GLOSARIUM | 102 |

| | |
|--|------------|
| BAB VI PROFESIONALISME GURU | 103 |
| A. Aliran Filsafat Pendidikan | 103 |
| B. Profesi Guru | 110 |
| BAB VII MODEL PEMBELAJARAN | 117 |
| A. Pendekatan Model Pembelajaran | 117 |
| B. Strategi Pembelajaran | 118 |
| C. Metode Pembelajaran | 119 |
| BAB VIII LESSON STUDY BERBASIS PTK | 123 |
| A. <i>Lesson Study</i> berbasis PTK | 123 |
| B. Macam-Macam Lesson Study Berbasis PTK | 124 |
| C. Model <i>Lesson Study</i> Berbasis PTK | 126 |
| D. L S Berbasis PTK Untuk Meningkatkan Profesi Guru..... | 129 |
| DAFTAR PUSTAKA | 135 |
| INDEKS..... | 142 |
| GLOSARIUM..... | 146 |

INOVASI PENDIDIKAN

BAB 1

A. Pengertian Inovasi Pendidikan

Inovasi secara etimologi berasal dari Kata Latin *innovation* yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya *innovo* yang artinya memperbaharui dan mengubah, inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju kearah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan).

Istilah perubahan dan pembaharuan ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, kalau pada pembaharuan ada unsur kesengajaan. Persamaannya. Yakni sama sama memiliki unsur yang baru atau lain dari yang sebelumnya. Kata "Baru" dapat juga diartikan apa saja yang baru dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun bukan baru lagi bagi orang lain. Namun, setiap yang baru itu belum tentu baik setiap situasi, kondisi dan tempat.

Inovasi Pendidikan menurut Ibrahim (1988) mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil intervensi (penemuan baru) atau *discovery* (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional.

Inovasi (pembaharuan) terkait dengan *invention* dan *discovery*. *Invention* adalah suatu penemuan sesuatu yang benar benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Penemuan sesuatu (benda) itu sebelumnya belum pernah ada, kemudian diadakan dengan bentuk kreasi baru. *Discovery* adalah suatu penemuan (benda), yang benda itu sebenarnya telah ada sebelumnya, tetapi semua belum diketahui orang. Jadi, inovasi adalah usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan (usaha) baik *invention* dan *discovery*.

BAB I INOVASI PENDIDIKAN

A. Pengertian Inovasi Pendidikan

Inovasi secara etimologi berasal dari Kata Latin *innovation* yang berarti pembaharuan atau perubahan. Kata kerjanya *innovo* yang artinya memperbaharui dan mengubah, inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju kearah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana (tidak secara kebetulan).

Istilah perubahan dan pembaharuan ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya, kalau pada pembaharuan ada unsur kesengajaan. Persamaannya. Yakni sama sama memiliki unsur yang baru atau lain dari yang sebelumnya. Kata “Baru” dapat juga diartikan apa saja yang baru dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun bukan baru lagi bagi orang lain. Namun, setiap yang baru itu belum tentu baik setiap situasi, kondisi dan tempat.

Inovasi Pendidikan menurut Ibrahim (1988) mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil intervensi (penemuan baru) atau *discovery* (baru ditemukan orang), yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional.

Inovasi (pembaharuan) terkait dengan *invention* dan *discovery*. *Invention* adalah suatu penemuan sesuatu yang benar benar baru, artinya hasil kreasi manusia. Penemuan sesuatu (benda) itu sebelumnya belum pernah ada, kemudian diadakan dengan bentuk kreasi baru. *Discovery* adalah suatu penemuan (benda), yang benda itu sebenarnya telah ada sebelumnya, tetapi semua belum diketahui orang. Jadi, inovasi adalah usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan (usaha) baik *invention* dan *discovery*.

Berbicara mengenai inovasi (pembaharuan) mengingatkan kita pada dua istilah yaitu *invention* dan *discovery*. *Invention* adalah merupakan penemuan sesuatu yang benar-benar baru, artinya merupakan hasil karya manusia. Sedangkan *discovery* adalah penemuan sesuatu (benda yang sebenarnya telah ada sebelumnya. Dengan demikian, inovasi dapat diartikan usaha menemukan benda yang baru dengan jalan melakukan kegiatan (usaha) *invention* dan *discovery*. Dalam kaitan ini Ibrahim (1989) mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan yang dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). Inovasi dapat berupa hasil dari *invention* atau *discovery*. Inovasi dilakukan dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah (Subandiyah 1992:80).

Proses dan tahapan perubahan itu ada kaitannya dengan masalah pengembangan (*development*), penyebaran (*diffusion*), diseminasi (*dissemination*), perencanaan (*planning*), adopsi (*adoption*), penerapan (*implementation*) dan evaluasi (*evaluation*) (Subandiyah 1992:77)

Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model inovasi yang baru yaitu: Pertama "*top-down model*" yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan/atasan yang diterapkan kepada bawahan; seperti halnya

inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Kedua "*bottom-up model*" yaitu model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Disamping kedua model yang umum tersebut di atas, ada hal lain yang muncul tatkala membicarakan inovasi pendidikan yaitu: a) kendala-kendala, termasuk resistensi dari pihak pelaksana inovasi seperti guru, siswa, masyarakat dan sebagainya, b). faktor-faktor seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas dan dana c). lingkup sosial masyarakat.

Pelaksanaan inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari inovator dan pelaksana inovasi itu sendiri. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan di Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan "Top-Down Innovation". Inovasi ini sengaja diciptakan oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Inovasi seperti ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan dengan cara mengajak, menganjurkan dan bahkan memaksakan apa yang menurut pencipta itu baik untuk kepentingan bawahannya. Dan bawahan tidak punya otoritas untuk menolak elaksanaannya.

Banyak contoh inovasi yang dilakukan oleh Depdiknas selama beberapa dekade terakhir ini, seperti Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA), Guru Pamong, Sekolah Persiapan Pembangunan, Guru Pamong, Sekolah kecil, Sistem Pengajaran Modul, Sistem Belajar jarak jauh dan lain-lain. Namun inovasi yang diciptakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan lembaga-lembaga asing seperti British Council, USAID dan lain-lain banyak yang tidak bertahan lama dan hilang, tenggelam begitu saja. Model inovasi yang demikian hanya berjalan dengan baik pada waktu berstatus sebagai proyek. Tidak sedikit model inovasi seperti itu, pada saat diperkenalkan atau bahkan selama pelaksanaannya banyak mendapat penolakan (*resistance*) bukan hanya dari pelaksana inovasi itu sendiri (di sekolah), tapi juga para pemerhati dan administrator di Kanwil dan Kandep. Model inovasi seperti yang diuraikan di atas, lazimnya disebut dengan model "Top-Down Innovation". Model itu kebalikan dari model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru atau masyarakat yang umumnya disebut model "Bottom-Up Innovation"

Ada inovasi yang juga dilakukan oleh guru-guru, yang disebut dengan "Bottom-Up Innovation". Model yang kedua ini jarang dilakukan di Indonesia selama ini karena sistem pendidikan yang sentralistis. Pembahasan tentang model inovasi seperti model "Top-Down" dan "Bottom-Up" telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan para ahli pendidikan. Sudah banyak pembahasan tentang inovasi pendidikan yang dilakukan misalnya perubahan kurikulum dan proses belajar mengajar. White (1988: 136-156) misalnya menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan inovasi seperti tahapan-tahapan dalam inovasi, karakteristik inovasi, manajemen inovasi dan sistem pendekatannya. Kennedy (1987:163) juga membicarakan tentang strategi inovasi yang dikutip dari Chin dan Benne (1970) menyarankan tiga jenis strategi inovasi, yaitu: Power Coercive (strategi pemaksaan), Rational Empirical (empirik rasional), dan Normative-Re-Educative (Pendidikan yang berulang secara normatif).

Strategi inovasi yang pertama adalah strategi pemaksaan berdasarkan kekuasaan merupakan suatu pola inovasi yang sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah inovasi itu sendiri. Strategi ini cenderung memaksakan kehendak, ide dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya dimana inovasi itu akan dilaksanakan. Kekuasaan memegang peranan yang sangat kuat pengaruhnya dalam

menerapkan ide-ide baru dan perubahan sesuai dengan kehendak dan pikiran-pikiran dari pencipta inovasinya. Pihak pelaksana yang sebenarnya merupakan obyek utama dari inovasi itu sendiri sama sekali tidak dilibatkan baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Para inovator hanya menganggap pelaksana sebagai obyek semata dan bukan sebagai subyek yang juga harus diperhatikan dan dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengimplementasiannya.

Strategi inovasi yang kedua adalah empirik Rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalinya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Dalam kaitan dengan ini inovator bertugas mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Di samping itu, strategi ini didasarkan atas pandangan yang optimistik seperti apa yang dikatakan oleh Bennis, Benne, dan Chin yang dikutip dari Cece Wijaya dkk (1991).

Di sekolah, para guru menciptakan strategi atau metode mengajar yang menurutnya sesuai dengan akal yang sehat, berkaitan dengan situasi dan kondisi bukan berdasarkan pengalaman guru tersebut. Di berbagai bidang, para pencipta inovasi melakukan perubahan dan inovasi untuk bidang yang ditekuninya berdasarkan pemikiran, ide, dan pengalaman dalam bidangnya itu, yang telah digeluti berbualan-bulan bahkan bertahun-tahun. Inovasi yang demikian memberi dampak yang lebih baik dari pada model inovasi yang pertama. Hal ini disebabkan oleh kesesuaian dengan kondisi nyata di tempat pelaksanaan inovasi tersebut.

Jenis strategi inovasi yang ketiga adalah normatif re-edukatif (pendidikan yang berulang) adalah suatu strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, John Dewey, Kurt Lewis dan beberapa pakar lainnya (Cece Wijaya (1991), yang menekankan bagaimana klien memahami permasalahan pembaharuan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia.

Dalam pendidikan, sebuah strategi bila menekankan pada pemahaman pelaksana dan penerima inovasi, maka pelaksanaan inovasi dapat dilakukan berulang kali. Misalnya dalam pelaksanaan perbaikan sistem belajar mengajar di sekolah, para guru sebagai pelaksana inovasi berulang kali melaksanakan perubahan-perubahan itu sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan. Kecenderungan pelaksanaan model yang demikian agaknya lebih menekankan pada proses mendidik dibandingkan dengan hasil dari perubahan itu sendiri. Pendidikan yang dilaksanakan lebih mendapat porsi yang dominan sesuai dengan tujuan menurut pikiran dan rasionalitas yang dilakukan berkali-kali agar semua tujuan yang sesuai dengan pikiran dan kehendak pencipta dan pelaksananya dapat tercapai.

Para ahli mengungkapkan berbagai persepsi, pengertian, interpretasi tentang inovasi seperti Kennedy (1987), White (1987), Kouraogo (1987) memberikan berbagai macam definisi tentang inovasi yang berbeda-beda. Dalam hal ini, penulis mengutip definisi inovasi yang dikatakan oleh White (1987:211) yang berbunyi: "Innovationmore than change, although all innovations involve change." (inovasi itu ... lebih dari sekedar perubahan, walaupun semua inovasi melibatkan perubahan). Untuk mengetahui dengan jelas perbedaan antara inovasi dengan perubahan, mari kita lihat definisi yang diungkapkan oleh Nichols (1983:4). "Change refers to " continuous reapraisal and improvement of existing practice which can be regarded as part of the normal activity while innovation refers to Idea, subject or practice as new by an individual or individuals, which is intended to bring about improvement in relation to desired objectives, which is fundamental in nature and which is planned and deliberate."

Nichols menekankan perbedaan antara perubahan (change) dan inovasi (innovation) sebagaimana dikatakannya di atas, bahwa perubahan mengacu kepada kelangsungan penilaian, penafsiran dan pengharapan kembali dalam perbaikan pelaksanaan pendidikan yang ada yang dianggap sebagai bagian aktivitas yang biasa. Sedangkan inovasi menurutnya adalah mengacu kepada ide, obyek atau praktek sesuatu yang baru oleh seseorang atau sekelompok orang yang bermaksud untuk memperbaiki tujuan yang diharapkan. Setelah membahas definisi inovasi dan perbedaan antara inovasi dan perubahan, maka berikut ini akan diuraikan tentang kendala yang mempengaruhi pelaksanaan inovasi pendidikan.

1. Kendala-kendala Dalam Inovasi Pendidikan

Kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum antara lain adalah: (1) perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi (2). konflik dan motivasi yang kurang sehat (3). lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan (4). keuangan (finacial) yang tidak terpenuhi (5). penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi (6) kurang adanya hubungan sosial dan publikasi (Subandiyah 1992:81). Untuk menghindari masalah-masalah tersebut di atas, dan agar mau berubah terutama sikap dan perilaku terhadap perubahan pendidikan yang sedang dan akan dikembangkan, sehingga perubahan dan pembaharuan itu diharapkan dapat berhasil dengan baik, maka guru, administrator, orang tua siswa, dan masyarakat umumnya harus dilibatkan

2. Penolakan (Resistance).

Setelah memperhatikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu inovasi pendidikan, misalnya penolakan para guru tentang adanya perubahan kurikulum dan metode belajar-mengajar, maka perlu kiranya masalah tersebut dibahas. Namun sebelumnya, pengertian tentang resisten itu perlu dijelaskan lebih dahulu. Menurut definisi dalam "*Cambridge International English Dictionary of English*" bahwa *Resistance is to fight against (something or someone) to not be changed by or refuse to accept (something)*. Resistensi adalah untuk melawan (sesuatu atau seseorang) untuk tidak akan diganti oleh atau menolak untuk menerima (sesuatu).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penolakan (resistance) itu adalah melawan sesuatu atau seseorang untuk tidak berubah atau diubah atau tidak mau menerima hal tersebut.

Ada beberapa hal mengapa inovasi sering ditolak atau tidak dapat diterima oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau di sekolah sebagai berikut:

- a. Sekolah atau guru tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan dan bahkan pelaksanaan inovasi tersebut, sehingga ide baru atau inovasi tersebut dianggap oleh guru atau sekolah bukan miliknya, dan merupakan kepunyaan orang lain yang tidak perlu dilaksanakan, karena tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi sekolah mereka.
- b. Guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat sekarang, karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan bertahun-tahun dan tidak ingin diubah. Disamping itu sistem yang mereka miliki dianggap oleh mereka memberikan rasa aman atau kepuasan serta sudah baik sesuai dengan pikiran mereka. Hal senada diungkapkan pula Day dkk (1987) dimana guru tetap mempertahankan sistem yang ada.

- c. Inovasi yang baru yang dibuat oleh orang lain terutama dari pusat (khususnya Depdiknas) belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. Hal ini juga diungkapkan oleh Munro (1987:36) yang mengatakan bahwa "mismatch between teacher's intention and practice is important barrier to the success of the innovatory program".
- d. Inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat merupakan kecenderungan sebuah proyek dimana segala sesuatunya ditentukan oleh pencipta inovasi dari pusat. Inovasi ini bisa terhenti kalau proyek itu selesai atau kalau finansial dan keuangannya sudah tidak ada lagi. Dengan demikian pihak sekolah atau guru hanya terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusat dan tidak punya wewenang untuk merubahnya.
- e. Kekuatan dan kekuasaan pusat yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah atau guru melaksanakan keinginan pusat, yang belum tentu sesuai dengan kemauan mereka dan situasi sekolah mereka. Untuk mengatasi masalah dan kendala seperti diuraikan di atas, maka berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan inovasi baru.

3. Faktor-Faktor yang Perlu Diperhatikan Dalam Inovasi

Untuk menghindari penolakan seperti yang disebutkan di atas, faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum dan fasilitas, dan program/tujuan,

a. Guru

Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas.

Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu, baik dengan siswa maupun antar sesama guru dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan seperti administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha serta masyarakat sekitarnya, pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri.

Dengan demikian, maka dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Tanpa melibatkan mereka, maka sangat mungkin mereka akan menolak inovasi yang diperkenalkan kepada mereka. Hal ini seperti diuraikan sebelumnya, karena mereka menganggap inovasi yang tidak melibatkan mereka adalah bukan miliknya yang harus dilaksanakan, tetapi sebaliknya mereka menganggap akan mengganggu ketenangan dan kelancaran tugas mereka. Oleh karena itu, dalam suatu inovasi pendidikan, gurulah yang utama dan pertama terlibat karena guru mempunyai peran yang luas sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai dokter, sebagai motivator dan lain sebagainya. (Wright 1987)

b. Siswa

Siswa sebagai obyek utama dalam pendidikan terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelegensia, daya motorik, pengalaman, kemauan dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan dari pada perubahan itu mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekwen. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya.

c. Kurikulum

Kurikulum pendidikan, lebih sempit lagi kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah.

d. Fasilitas

Fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa diabaikan dalam dalam proses pendidikan khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja dan sebagainya.

e. Lingkup Sosial Masyarakat.

Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut tapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif, dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan. Masyarakat secara tidak langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan. Sebab, apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu

akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Kata Kunci : inovasi, perubahan, penolakan, kurikulum, siswa, guru, fasilitas, inovator, pelaksana, masyarakat, sekolah, keterlibatan, top-down-bottom-up, sosial, program, pendidikan.

Kesimpulan dari uraian tersebut di atas bahwa inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovator, penyelenggara inovasi seperti guru dan siswa. Disamping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak saja ditentukan oleh satu atau dua faktor saja, tapi juga oleh masyarakat serta kelengkapan fasilitas. Inovasi pendidikan yang berupa top-down model tidak selamanya bisa berhasil dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyak hal antara lain adalah penolakan para pelaksana seperti guru yang tidak dilibatkan secara penuh baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Sementara itu inovasi yang lebih berupa bottom-up model dianggap sebagai suatu inovasi yang langgeng dan tidak mudah berhenti karena para pelaksana dan pencipta sama-sama terlibat mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Oleh karena itu mereka masing-masing bertanggung jawab terhadap keberhasilan suatu inovasi yang mereka ciptakan.

B. Kebijakan dalam Inovasi Pendidikan

1. Standar Nasional Pendidikan

Adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar isi, proses kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berkala.

2. Badan Standar Nasional Pendidikan.

Dalam rangka pengembangan, pemantauan dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan yang berkedudukan di ibu kota wilayah Negara Republik Indonesia yang berada dibawah tanggung jawab kepada Menteri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BSNP bersifat mandiri dan profesional. Keanggotaan BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang. Anggota BSNP terdiri atas ahli-ahli di bidang psikometri, evaluasi pendidikan, kurikulum, dan manajemen pendidikan yang memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.

3. Pengembangan Karier Guru (Sertifikasi)

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru bertujuan untuk: 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan

tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. 3) Meningkatkan martabat guru. 4) meningkatkan profesionalitas guru

Sedangkan manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut. a) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. b) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. c) Meningkatkan kesejahteraan guru.

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007. (Dalam KTSP Diakses dari [presiriau.com/... pendidikan/ktsp-kuri-kulum-tingkat-satuan-pendidikan/](http://presiriau.com/...pendidikan/ktsp-kuri-kulum-tingkat-satuan-pendidikan/))

C. Inovasi di Bidang Pembelajaran

1. Standar Kompetensi Lulusan

Adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan (aspek kognitif), sikap (spek afektif), dan keterampilan (aspek psikomotorik). Digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SKL digunakan untuk seluruh mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

2. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik.

3. KTSP

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Landasan KTSP adalah: 1) Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Standar Isi Standar Kompetensi Lulusan Pengembangan KTSP

Sejarah pendidikan di Indonesia mencatat telah terjadi perubahan, penyempurnaan kurikulum. Yang di mulai tahun 1960, 1964, 1968, 1975, 1994, 2004 dan sekarang 2006. Untuk kurikulum tahun 2006 lebih populer dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

KTSP memberi keleluasaan penuh setiap sekolah mengembangkan kurikulum dengan tetap memerhatikan potensi sekolah dan potensi daerah sekitar. Ketua BSNP pada waktu itu Bambang Suhendro , menegaskan, tahun 2006 Kurikulum 2006

merupakan hasil kreasi dari guru-guru di sekolah berdasarkan standar isi dan standar kompetensi.

Hal sama juga dikemukakan Djaali, Sekretaris BSNP. “Terbitnya peraturan menteri tentang standar isi dan standar kompetensi itu kelak menandai diserahkannya kewenangan kepada guru untuk menyusun kurikulum barta,” Bambang menjelaskan, kurikulum 2006 lebih memberdayakan guru untuk membuat konsep pembelajaran yang membina sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah. Dalam standar isi tercakup struktur, beban, dan jam pelajaran. Kurikulum 2006 yang diperkenalkan dengan nama KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan), merupakan hasil penegasan dari atau sejalan dengan kebijakan desentralisasi.

4. Program Pengembangan Muatan Lokal

Latar belakang adanya pengembangan muatan lokal antara lain: (1) otonomi daerah, (2) desentralisasi, (3) multikultural, (4) pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang kekhususan yang ada di lingkungannya, dan (5) Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestariannya. Pengembangan muatan lokal mengacu pada kondisi daerah dan kebutuhan daerah. Kondisi daerah berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya yang selalu berkembang. Kebutuhan daerah yaitu segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang disesuaikan dengan arah perkembangan dan potensi yang ada di daerah.

Tujuan Mulok, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.

Secara terperinci tujuan mulok agar peserta didik dapat: (a) Mengetahui dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya (b) Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya (c) Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Dasar Hukum Mulok adalah (1) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2), (3) Permen RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (4) Perda Kabupaten atau Kota Madya.

Penyusunan Muatan Lokal. Dalam penyusunan muatan lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Dit. Pembinaan SMA (2009) bahwa (a) Materi pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik yang berkaitan dengan pengetahuan, cara berpikir, emosional, dan sosial. (b) Pelaksanaan Mulok tidak mengganggu pelaksanaan komponen mata pelajaran (komponen A dalam struktur kurikulum). (c) Kegiatan pembelajaran diatur agar tidak memberatkan peserta didik, oleh karena itu dalam pelaksanaan Mulok diharapkan tidak ada pekerjaan rumah (PR)

(d) Program pembelajaran dikembangkan dengan melihat kedekatan secara fisik dan secara psikis

Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Pengembangan Muatan Lokal;

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Sekolah, (2) Tim Pengembang Kurikulum Provinsi/Kabupaten/ Kota (3) LPMP (4) LPTK dan atau Perguruan Tinggi (5) Instansi/lembaga di luar Dinas, misalnya: Pemerintah Daerah, dinas lain yang terkait, Dunia Usaha/Industri (6) Tokoh Masyarakat.